

BAB IV

ANALISIS PRORAM DERADIKALISASI BNPT TAHUN 2012

A. Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012

Deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Mendapat awalan *de-* yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-ize* yang dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan *-isasi* berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari).

Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹

Sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun menggunakan strategi deradikalisasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, setidaknya ada tiga program besar deradikalisasi yang dicanangkan BNPT dalam

¹ Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm. 62

menanggulangi terorisme di Indonesia pada tahun 2010-2011. Ketiga program tersebut antara lain;

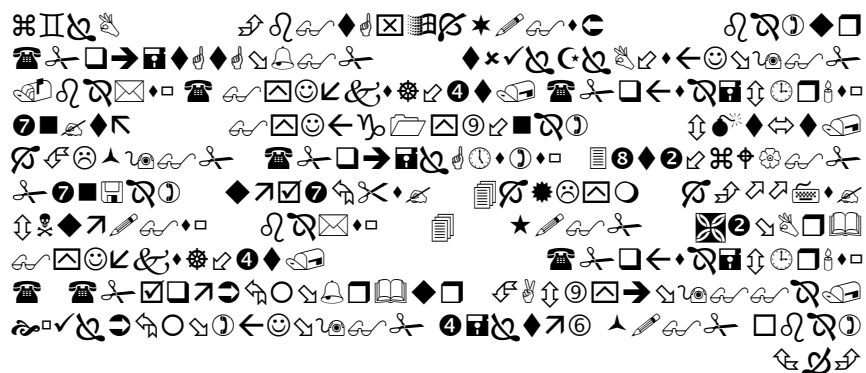
Pertama, Pembinaan Kepribadian, yakni pembinaan terkait *mindset* atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa diterima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam *mindset* masing-masing individu.

Kedua, Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.

Ketiga, Pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

Jika melihat pengertian deradikalisasi di atas yang lebih menekankan proses dialog dalam mengatasi terorisme, maka strategi tersebut pun dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam, kita mengenal *baghat* yang sama pengertiannya dengan terorisme. Pada hakikatnya sanksi *baghat* adalah hukuman mati, namun ulama mazhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Jika mereka menyebut beberapa kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut.

Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali tunduk dan patuh kepada imam atau kepala negara. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk kembali, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan surat al-Hujjarat ayat 9:



“Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali

kepada perintah Allah; jika golongan telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.” (QS. Al-Hujurat: 9)

Strategi islah dengan cara dialog sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan tersirat dalam ayat di atas. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib saat menjadi Khalifah. Salah satunya adalah ketika muncul kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan keluar dari pemerintah.

Menurut riwayat, jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas kepada untuk mendekati dan dialog kepada mereka agar kembali patuh kepada imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk ke dalam pemerintahan, sedang 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang kemudian boleh diperangi.

Pendekatan dialog serta ajakan untuk kembali patuh kepada imam perlu dilakukan, karena tujuan pemberantasan pemberontakan adalah untuk mencegah, bukan membunuh mereka. Dengan demikian, apabila dengan ucapan dan dialog mereka dapat kembali patuh kepada imam, tidak perlu diadakan penumpasan atau pertempuran, karena pertempuran tetap menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak.

Pilihan langkah tersebut sesuai dengan kaidah fiqh *maslahat mursalah*, yakni penyelesaian sebuah persoalan dengan pertimbangan atau pilihan yang

mendatangkan kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan. Hal tersebut berdasarkan kaidah yang berbunyi;

جلب المصالح ودرء المفا سد

“Menarik Kemaslahatan dan menolak kerusakan”

Selain pertimbangan di atas, sejak diturunkan di muka bumi, Islam sudah mendeklarasikan diri sebagai ajaran yang menjadi rahmat bukan hanya bagi pemeluknya atau kelompok tertentu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam “*rahmatan lil alamin*”. Hal itu menunjukkan bahwa sejatinya Islam merupakan agama yang damai, penuh kasih sayang, anti kekerasan dan bisa menerima perbedaan yang ada².

Teologi *rahmatan lil alamin* ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya: 107)

B. Analisis Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme BNPT

Berdasarkan data yang diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada akhir 2010 lalu, terdapat 29 lapas dengan total narapidana terorisme 115 orang. Dari jumlah total, Pidana penjara sementara 98 orang, pidana mati 2 orang, dan 15 orang dipidana seumur hidup³.

² Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan*, Jakarta: Inti Media, 2009, hlm. 75

³ Data tersebut diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada Desember 2010 di Jakarta.

Dalam rangka menjalankan mandat presiden sebagai lembaga untuk penanggulangan terorisme, telah banyak program dilakukan BNPT. Program BNPT pada tahun 2012 yang merupakan program terusan dari periode sebelumnya. Beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan BNPT pada tahun 2012 antara lain:

1. Resosialisasi mantan terorisme dan keluarga

Yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia.

2. Rehabilitasi mantan teroris di lapas

Rehabilitasi ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga negara yang baik.

3. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada nara pidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi, wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik.

4. Pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas

Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk secara bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang langsung di masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga akan terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia.

5. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi di 15 provinsi

Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi

keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2012 dilakukan pada 15 provinsi. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

6. TOT Anti Radikalisme dan Terorisme

Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainer-trainer anti radikalisme dan terorisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme.

7. Workshop kurikulum pendidikan agama

Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi.

8. Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan sikap-sikap anti radikalisme dan terorisme. Mereka

ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

9. Pendirian pusat kajian deradikalisasi di perguruan tinggi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusat-pusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas.

10. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi

Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi di masyarakat agar pelaksanaan deradikalisasi di masyarakat dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah pedoman tersebut disusun, maka disosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui dan mempedomani buku tersebut agar terwujud sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi.

11. Penelitian anatomi kelompok radikal

Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pematapan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok

radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal.

Beberapa program di atas merupakan buah dari tiga konsep besar program deradikalisasi, yakni;

1. Pembinaan Kepribadian

Dalam rangka melakukan pembinaan kepribadian, BNPT mengadakan dialog dari hati ke hati terhadap narapidana dan keluarga mereka terorisme. Dialog dengan para narapidana dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa Lembaga Kemasyarakatan (LP) seperti di Palu, Palembang, dan Surabaya Porong. Sedangkan pembinaan kepribadian kepada keluarga narapidana terorisme baru dilakukan di Palu. Dialog diikuti oleh lebih kurang 60 orang peserta. Hasilnya, beberapa istri narapidana terorisme tersebut berkenan melepas cadar yang selama ini menutupi wajah mereka.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka agar ketika kelak mereka bebas dari masa tahanan dan dari ideologi terorisme, mereka mampu bertahan hidup tanpa harus tergantung dengan orang lain atau organisasi teroris yang pernah diikuti.

Pembinaan Kemandirian bagi narapidana terorisme baru dilakukan di Palembang dan Palu. Pembinaan tersebut berbentuk pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian bagi keluarga

narapidana terorisme, baru dilakukan di Palu dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering dan basah.

3. Pembinaan Preventif Berkelanjutan

Pembinaan preventif berkelanjutan ini dalam rangka pembinaan dan sosialisasi untuk membendung paham terorisme. Secara kongkrit, BNPT telah mengadakan beberapa pelatihan, workshop dan training. Dalam melaksanakan program tersebut BNPT menggandeng institusi lain yang mempunyai kepedulian terhadap isu terorisme.

Pada akhir maret 2012 lalu, BNPT bekerja sama dengan LSM Lembaga Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) mengadakan *Training Of Trainer (TOT)* Anti Radikalisme dan Terorisme dalam Rangka Penangkalan Radikalisme dan Terorisme. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 29-31 Maret 2012 dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, masyarakat maupun ilmuwan yang ada di Surakarta dan sekitar.

Dalam TOT tersebut, pihak panitia menghadirkan sejumlah pembicara baik tingkat lokal maupun nasional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Bahkan dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga salah seorang mantan aktivis NII yang membedah pergerakan NII hingga saat ini. Di akhir kesempatan, seluruh peserta diajak berevaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi terorisme khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Jika melihat dari makna deradikalisasi sekaligus implementasi beberapa program deradikalisasi BNPT pada tahun 2012 di atas, dalam pandangan penulis strategi ini sangatlah tepat. mengingat beberapa hal; *Pertama*, kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa yang bisa diselesaikan dengan penangkapan dan hukuman. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagamaan radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebut harus diutamakan (*war of idea*).

Kedua, pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. *Ketiga*, mengingat banyak fakta, bahwa penyelesaian sebuah persoalan dengan cara kekerasan justru akan memperkeruh persoalan tersebut. Perang Amerika dan sekutu yang dipimpin oleh George Walker Bush melawan terorisme misalnya, perburuan terhadap kelompok pelaku peledakkan WTC (*World Trade Center*) ke beberapa negara Timur Tengah justru mengundang perlawanan dari banyak kalangan. Bahkan, aksi teror semakin merebak di berbagai penjuru dunia dengan alasan balas dendam atas ekspansi Amerika dan sekutu ke beberapa negara Timur Tengah.

Di Indonesia sendiri, aksi kekerasan para aparat yang tergabung dalam Satuan Tugas Densus 88 beberapa kali terjadi, bahkan sebagian oknum yang disinyalir anggota kelompok terorisme tewas dalam prosesi penangkapan.

Walhasil, tindakan teror semakin merajalela dan vulgar, bahkan beberapa kali aksi dilakukan di dalam instansi kepolisian dengan target aparat. Beberapa serangan tersebut antara lain; penyerangan di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara yang menewaskan tiga anggota polisi (22/9),⁴ peledakan bom bunuh diri oleh Muhammad Syarif di Masjid Mapolresta Cirebon yang menewaskan pelaku dan melukai sedikitnya 23 orang.⁵

Beberapa fakta di atas cukup membenarkan teori Thomas More yang dikutip oleh Hendrojono (2005), bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.⁶ Kaitannya dengan hal tersebut pula, maka deradikalisasi dianggap strategi yang paling tepat untuk menghadapi maraknya tindak terorisme atas dasar faham keagamaan yang radikal saat ini. Strategi tersebut bahkan diterapkan oleh sebagian besar negara yang mengalami problem terorisme di negara mereka, antara lain Arab Saudi, Yaman, mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, dan Tajikistan.

⁴ Peristiwa tersebut merupakan serangan balasan atas penyerangan tiga pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan oleh Densus 88. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustofa, salah satu pendiri Jamaah Islamiyah. Karir pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah dalam kelompoknya dimulai sejak 1987, setelah Abu Tholut lulus pelatihan kemiliteran Angkatan IV di Afghanistan dan menjadi Instruktur di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan di Sadda. Pada tahun 1993 bergabung dengan Jamaah Islamiyah, lalu diminta Abdullah Sungkar menjajaki tempat latihan militer di Moro Filipina. Menjadi pelatih kemiliteran di Al-Islamic al-Jamaah Military Academy di Muaskar, Hidaybiyah, Filipina Selatan, perintis Mantiqi III (Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sabah, dan Filipina Selatan), ketua Kamp latihan militer Hidaybiyah di Mindanao, Filipina Selatan. Terlibat dalam tragedi Poso, sekaligus sebagai perekrut Asmar Latin Sanai, pelaku bom Hotel Marriot. Baca Tempo, edisi 27 September - 3 Oktober 2010, hlm. 109-115

⁵ Peristiwa bom bunuh diri terjadi pada hari Jum'at, 15 April 2011. Baca Kompas, 16 April 2011

⁶ Dikutip oleh Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005, hlm. 13

